

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah mampu mendorong kegairahan daerah untuk mengembangkan perekonomiannya. UU No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula (Husna, 2013). Maka, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal (Syofya, 2017). Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Husaini, 2021).

Pengembangan potensi ekonomi lokal dilakukan melalui peningkatan dalam kapasitas ekonomi lokal untuk menciptakan kesejahteraan bagi penduduk lokal (Haridison, dkk, 2022). Peningkatan yang dimaksud akan terjadi apabila sumber daya lokal, seperti tenaga kerja dan lahan, dimanfaatkan dengan lebih produktif (Lili & Diartho, 2018). Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan mengenai peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengenai perwujudan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang didalamnya terdapat KSP Kawasan Agropolitan. KSP Agropolitan bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan pertanian hulu-hilir dan penambahan nilai ekonomi komoditas pertanian.

Kawasan agropolitan tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan agrobisnis (Rohma & Rahmawati, 2020). Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, agropolitan merupakan suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang mampu melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (Nugraha, 2012). Terdapat beberapa syarat suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi

kawasan agropolitan adalah memiliki komoditas pertanian yang dapat menggerakkan ekonomi kawasan, kelembagaan pertanian, daya dukung sumber daya alam, sarana prasarana pasar, aksesibilitas, dan prasarana sarana pendukung agropolitan serta sarana prasarana umum (Kaunang et al., 2023).

Konsep pengembangan kawasan agropolitan berfokus pada semua subsistem pertanian mulai dari hulu, *on farm*, hilir baik pengolahan dan pemasaran, serta infrastruktur dan jasa-jasa pendukung lainnya (Ahmad & Saleh, 2019). Upaya untuk mengoptimalkan potensi kawasan agropolitan yaitu perlunya pengkajian lebih mendalam terhadap komoditas unggulan daerah sebagai landasan strategis untuk pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis yaitu kondisi tanah dan iklim maupun sosial ekonomi dan kelembagaan yaitu penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya, manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat (Badan Litbang Pertanian, 2003). Pengembangan komoditas yang memiliki keunggulan spesifik wilayah akan menciptakan ruang yang kondusif dalam pengembangan pertanian berkelanjutan (Masi & Iswandi, 2024). Identifikasi komoditas unggulan penting dilakukan untuk menyusun arahan pengembangan agar komoditas tersebut dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai komoditas andalan wilayah (Abidin, 2018).

Kabupaten Wonosobo berada pada ketinggian pada ketinggian 200 sampai 2.250 meter di atas permukaan laut serta rata-rata suhu udara antara 14,3-26,5 °C, sehingga dengan kondisi geografis tersebut Kabupaten Wonosobo termasuk dalam wilayah yang subur sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Kabupaten Wonosobo termasuk dalam Kawasan Agropolitan berdasarkan Perda No 16 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kawasan agropolitan SOBOBANJAR yaitu Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Kebijakan Penataan Ruang Perda No 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo, pengembangan kawasan agropolitan berkaitan dengan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan budidaya. Hal ini dikarenakan kawasan agropolitan dapat bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pertanian di setiap desa, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan hasil pertanian.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2023, sektor pertanian berhasil menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonosobo, yang mencapai 29,6 persen. Pertanian di Kabupaten Wonosobo berperan penting dalam perekonomian lokal, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan penyediaan bahan pangan. Produksi pertanian memiliki peran yang sangat strategis dan dinamis dalam perekonomian di suatu wilayah terutama di Kabupaten Wonosobo. Pengembangan komoditas unggulan pertanian dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Permasalahan yang sering dihadapi petani yaitu harga komoditas pertanian yang rendah pada musim panen raya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penanganan pasca panen pada bahan makanan untuk mempertahankan nilai ekonomisnya terutama dalam mengatasi permasalahan yang sering dihadapi pada musim panen raya dan tetap tersedianya komoditas hasil pertanian saat musim panen serta menjaga nilai jual produk dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Penanganan pasca panen secara langsung berperan dalam mengurangi kehilangan hasil, menjaga kualitas hasil, menambah nilai, daya saing dan pendapatan usaha tani.

Dengan melihat potensi dan permasalahan yang dimiliki, maka untuk mengoptimalkan potensi kawasan agropolitan, perlunya pengkajian mengenai pengembangan sarana penunjang pendukung kawasan agropolitan yang meliputi peningkatan komoditas pertanian yang dapat menggerakkan ekonomi kawasan dengan memperhatikan komoditas unggulan dan sarana pendukung agropolitan. Pengkajian pengembangan sarana penunjang pendukung kawasan agropolitan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta mengembangkan komoditas yang diunggulkan di Kabupaten Wonosobo.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dalam kebijakan penataan ruang RTRW Kabupaten Wonosobo, bahwa pengembangan kawasan agropolitan berkaitan dengan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten. Pada masing-masing kecamatan memiliki potensi dan keunggulan pada setiap sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Namun, belum menentukan komoditas unggulan yang mengakibatkan belum optimalnya hasil pertanian sehingga belum maksimalnya peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat. Berdasarkan kondisi eksisting menunjukkan bahwa terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki sarana pendukung kawasan agropolitan seperti masih rendahnya ketersediaan sarana pertanian pada penanganan pasca panen.

Melihat kondisi tersebut, perlunya pengembangan sarana penunjang pendukung kawasan agropolitan yang bertujuan untuk menjaga kualitas hasil, menambah nilai, daya saing dan pendapatan usaha tani. Berkembangnya sistem dan usaha agribisnis tidak saja membangun usaha budidaya (on farm) saja tetapi juga off farm yaitu usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian), serta agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran) dan jasa penunjangnya (Basri & Arifin, 2010). Dalam penyediaan kebutuhan fasilitas pendukung pertanian, perlu mempertimbangkan hasil produktivitas komoditas unggulan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu adanya arahan pengembangan terkait fasilitas pendukung kawasan agropolitan berupa pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran yang dapat mendorong pelayanan kegiatan pertanian. Dasar perencanaan ini merujuk pada kebijakan penataan ruang mengenai pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) serta kebijakan lainnya yang relevan.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan tugas akhir “Pengembangan Sarana Penunjang Pendukung Kawasan Agropolitan di Kabupaten Wonosobo” ini adalah untuk merumuskan pengembangan sarana penunjang pendukung kawasan agropolitan yang dapat mengoptimalkan potensi lokal.

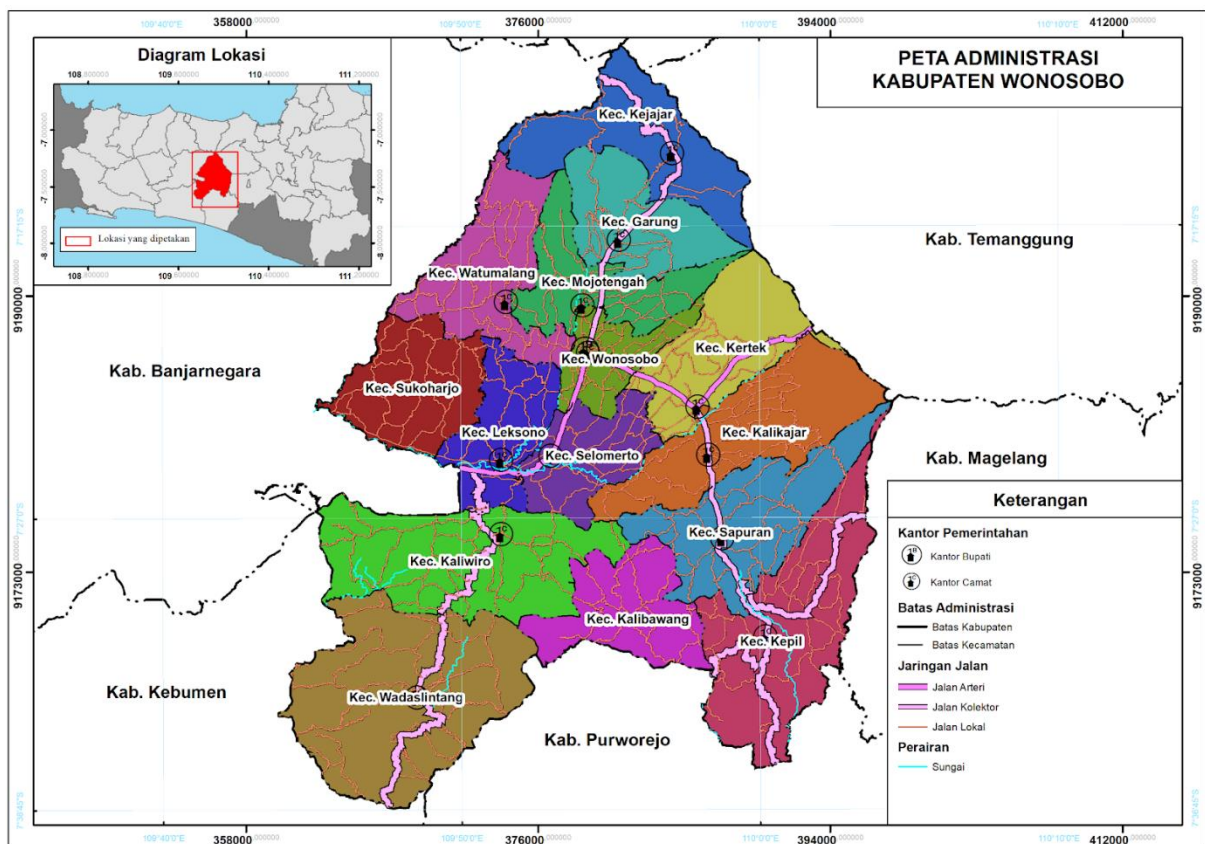
Adapun sasaran dalam penulisan tugas akhir “Pengembangan Sarana Penunjang Pendukung Kawasan Agropolitan di Kabupaten Wonosobo” ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kecamatan produsen komoditas unggulan berdasarkan komoditas unggulan di Kabupaten Wonosobo.
2. Menganalisis ketersediaan fasilitas pendukung komoditas unggulan (pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran).
3. Menganalisis kebutuhan fasilitas pendukung berupa fasilitas pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran pada kecamatan produsen komoditas unggulan di Kabupaten Wonosobo.
4. Menganalisis ketersediaan lahan di Kabupaten Wonosobo.
5. Menganalisis area potensial di Kabupaten Wonosobo

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah dalam tugas akhir ini adalah Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat pada cakupan administrasi, Kabupaten Wonosobo memiliki 15 kecamatan, 236 desa, dan 29 kelurahan. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang di sebelah utara, Kabupaten Temanggung dan Magelang di sebelah timur, Kabupaten Kebumen dan Purworejo di sebelah selatan, serta Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen di sebelah barat.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, 2024

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Kecamatan produsen komoditas unggulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Location Quotient dan Shift Share untuk menentukan komoditas unggulan. Identifikasi ini digunakan untuk mengetahui komoditas unggulan pertanian subsektor

tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di setiap kecamatan, nantinya setiap kecamatan tidak hanya memiliki satu fungsi tetapi memiliki kombinasi fungsi.

2. Ketersediaan fasilitas pendukung komoditas unggulan dalam penelitian ini dilakukan dengan identifikasi fasilitas pendukung pertanian yang berupa pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran. Ketika terdapat suatu fasilitas pertanian, maka mampu memberi dukungan dalam hal pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran. Jika terdapat ketidakadaan maka menjadi suatu kebutuhan.
3. Kebutuhan fasilitas dalam penelitian ini dihasilkan dari ketidakadaan antara ketersediaan fasilitas pendukung komoditas unggulan. Perhitungan kebutuhan dilakukan melalui pendekatan jumlah komoditas di kecamatan produsen komoditas unggulan.
4. Ketersediaan lahan dalam penelitian ini melalui metode pemetaan spasial (*overlay*) yang nantinya digunakan untuk mengetahui lahan yang dapat dikembangkan sesuai peruntukan fasilitas pertanian di Kabupaten Wonosobo berdasarkan penggunaan lahan, LSD, rawan bencana, kawasan sempadan, dan kebijakan terkait fasilitas pertanian.
5. Area potensial dalam penelitian ini melalui metode pemetaan spasial (*overlay*) yang nantinya digunakan untuk mengetahui area potensial sesuai peruntukkan sarana pendukung pertanian di Kabupaten Wonosobo berdasarkan jarak terhadap jalan utama, jarak bangunan ke SPBU, jarak bangunan ke TPA, jarak bangunan ke permukiman, radius yang terlayani oleh jaringan listrik, dan radius yang terlayani oleh jaringan air bersih.

1.5 Tahapan/Proses

Tahapan/proses dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga output yang dihasilkan. Berikut merupakan tahapan/proses yang digunakan dalam tugas akhir “Arahan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Wonosobo”.

1.5.1 Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dimulai dengan mengkaji terkait karakteristik kawasan agropolitan yang meliputi ciri-ciri, sistem, dan kebijakan kawasan agropolitan, identifikasi infrastruktur dengan fungsi produk produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil, fungsi Hasil produksi komoditas pertanian, serta mengidentifikasi gambaran awal mengenai wilayah studi yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam arahan pengembangan kawasan agropolitan.

1.5.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data mencakup data-data yang diperlukan dalam melakukan analisis. Pada studi kasus kawasan agropolitan di Kabupaten Wonosobo ini data-data yang diperlukan yaitu:

1. Data hasil produktivitas komoditas pertanian Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2023 yang bersumber dari instansi pemerintahan Kabupaten Wonosobo.
2. Data *shapefile* penggunaan lahan, Kawasan Hutan, LSD, kawasan rawan banjir, kawasan tanah longsor, kawasan sempadan, dan pola ruang RTRW Kabupaten Wonosobo yang bersumber dari instansi pemerintahan Kabupaten Wonosobo.
3. Data jumlah dan jenis fasilitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di Kabupaten Wonosobo yang bersumber dari instansi pemerintahan Kabupaten Wonosobo dan BPS dalam angka.

1.5.3 Tahap Analisis

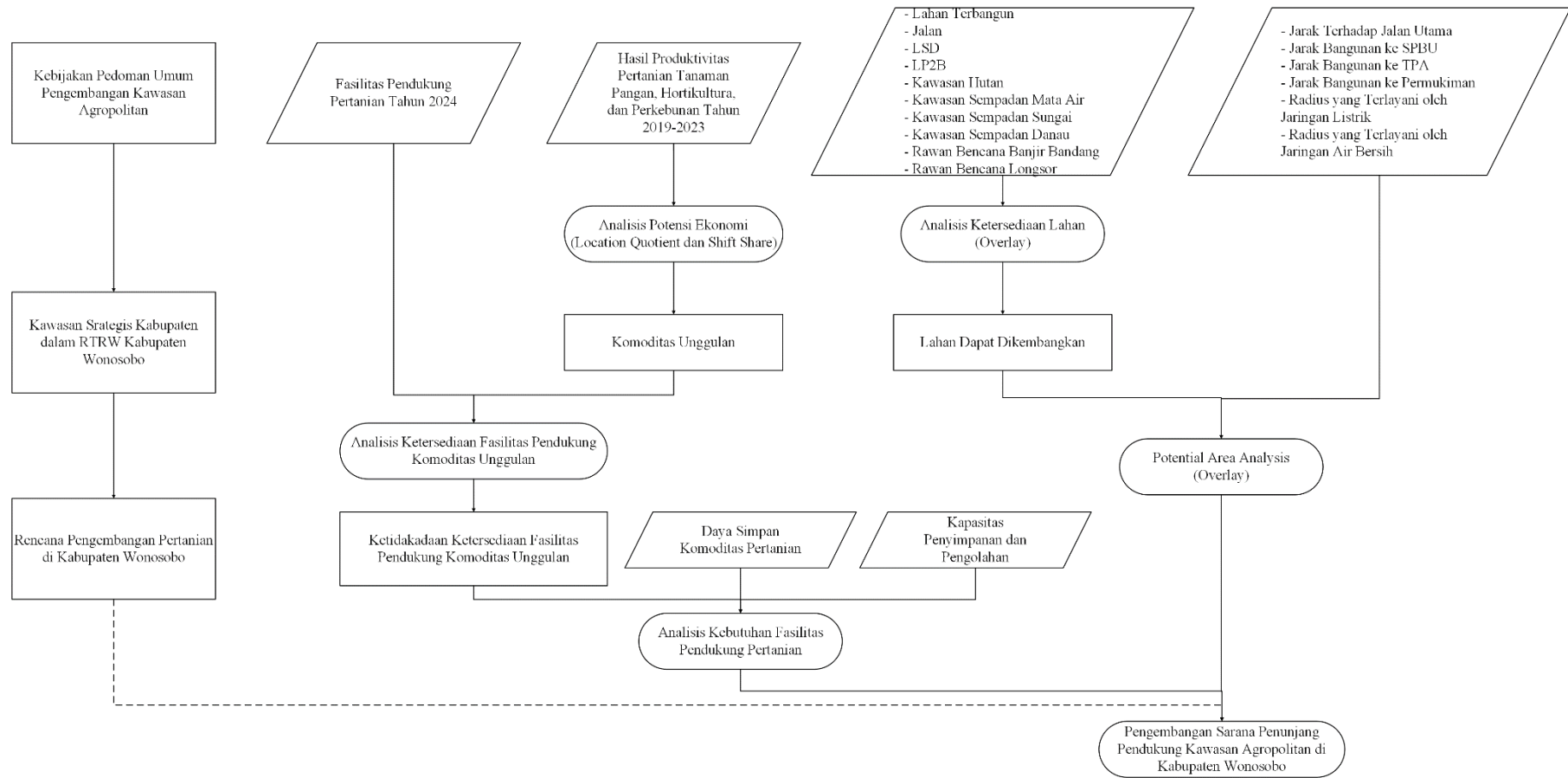
Tahap analisis berisi mengenai berbagai analisis yang akan dilakukan untuk merumuskan tujuan perencanaan pada tahap output yang dihasilkan. Pada tahap ini terdapat analisis:

1. Analisis potensi ekonomi yang digunakan untuk mengetahui komoditas unggulan beserta kecamatan produsen komoditas unggulan.
2. Analisis ketersediaan fasilitas pendukung komoditas unggulan berupa pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran yang digunakan untuk mengetahui ada dan tidak fasilitas pendukung pertanian. Jika terdapat ketidakadaan maka menjadi suatu kebutuhan.
3. Analisis kebutuhan fasilitas pendukung pertanian untuk mengetahui kebutuhan fasilitas pendukung pertanian berupa pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran yang dihasilkan dari ketidakadaan ketersediaan fasilitas pendukung komoditas unggulan.
4. Analisis ketersediaan lahan untuk mengetahui lahan yang yang dapat dikembangkan fasilitas pertanian di Kabupaten Wonosobo.
5. Analisis area potensial untuk mengidentifikasi area potensial yang sesuai dengan peruntukkan sarana pendukung pertanian, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.

1.5.4 Output yang Dihasilkan

Pada tahap akhir dalam tugas akhir ini menghasilkan output berupa arahan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Wonosobo yang mencakup:

1. Komoditas unggulan dan kecamatan produsen komoditas unggulan di Kabupaten Wonosobo.
2. Ketersediaan fasilitas pendukung komoditas unggulan berupa pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran.
3. Kebutuhan fasilitas pendukung berupa fasilitas pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran pada kecamatan produsen komoditas unggulan di Kabupaten Wonosobo.
4. Ketersediaan lahan di Kabupaten Wonosobo.
5. Area potensial untuk sarana penunjang pendukung kawasan agropolitan di Kabupaten Wonosobo



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 1. 2 Kerangka Analisis

1.6 Metode dan Hasil Akhir

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam mencapai tujuan penelitian. Metode memuat kebutuhan data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Hasil akhir merupakan temuan yang diperoleh yang diperoleh setelah melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Berdasarkan uraian tersebut, berikut metode yang disusun untuk menghasilkan output tugas akhir “Pengembangan Sarana Penunjang Pendukung Kawasan Agropolitan di Kabupaten Wonosobo”.

1.6.1 Kebutuhan Data

Penyusunan tabel kebutuhan data berfungsi untuk mempermudah proses memperoleh data pada saat survey berlangsung sehingga akan lebih terstruktur dan lebih efisien. Dalam penelitian, data adalah informasi yang dikumpulkan, diamati, atau dibuat untuk memvalidasi temuan penelitian. Data menjadi komponen penting dalam penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, karena menjadi dasar untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan. Berikut merupakan tabel kebutuhan yang telah disusun:

Tabel 1. 1 Kebutuhan Data

No	Jenis Analisis	Nama Data	Tipe Data	Unit Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Tahun Data	Sumber Data
1	Kajian mengenai kondisi wilayah studi							
	Kondisi Geografis	Kemiringan lereng	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Jenis tanah	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Curah hujan	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Hidrologi	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Hidrogeologi	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Penggunaan lahan	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
	Kawasan Rawan Bencana	Banjir	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Tanah longsor	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
	Kawasan Sempadan	Sempadan sungai	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Sempadan mata air	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Sempadan danau	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
	Kawasan Hutan	Kawasan hutan	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
	LSD	LSD	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
	Kependudukan	Luas wilayah	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Telaah dokumen	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Jumlah penduduk	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Telaah dokumen	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Kepadatan penduduk	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Telaah dokumen	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo

No	Jenis Analisis	Nama Data	Tipe Data	Unit Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Tahun Data	Sumber Data
	Peran sektor pertanian dalam PDRB	PDRB ADHK	Numerik	Kabupaten	Sekunder	Telaah dokumen	2024	BPS Kabupaten Wonosobo
		Laju pertumbuhan PDRB	Numerik	Kabupaten	Sekunder	Telaah dokumen	2024	BPS Kabupaten Wonosobo
	Peran aktivitas pertanian dalam penyerapan tenaga kerja	Persentase penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama	Numerik	Kabupaten	Sekunder	Telaah dokumen	2024	BPS Kabupaten Wonosobo
	Potensi produksi pertanian	Produksi komoditas tanaman pangan	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Survei instansi	2019-2023	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
		Produksi komoditas hortikultura	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Survei instansi	2019-2023	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
		Produksi komoditas perkebunan	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Survei instansi	2019-2023	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
	Ketersediaan sarana pertanian	Sarana pertanian a. Gudang penyimpanan b. Gudang pengawetan c. Unit Pembibitan Rakyat (UPR) d. Toko pertanian e. Tempat penggilingan padi f. Pengolahan hasil pertanian g. Pasar umum h. Sub Terminal Agribisnis (STA) i. Bank j. BPR k. Koperasi	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Survei instansi	2024	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
	2	Analisis potensi ekonomi						

No	Jenis Analisis	Nama Data	Tipe Data	Unit Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Tahun Data	Sumber Data
	Potensi ekonomi	Jumlah Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Survei instansi	2019-2023	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
		Jumlah Produktivitas Hortikultura	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Survei instansi	2019-2023	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
		Jumlah Produktivitas Perkebunan	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Survei instansi	2019-2023	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
3	Analisis ketersediaan fasilitas pendukung komoditas unggulan							
	Ketersediaan	Sarana pertanian	Deskriptif	Kecamatan	Sekunder	Survei instansi	2024	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
4	Analisis kebutuhan fasilitas pendukung pertanian							
	Kebutuhan	Jumlah produksi pertanian	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Survei instansi	2024	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
		Daya simpan komoditas pertanian	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Telaah dokumen dan Survei instansi	2024	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dan Artikel
		Kapasitas fasilitas pertanian	Numerik	Kecamatan	Sekunder	Telaah dokumen	2024	Kementerian Perdagangan
5	Analisis ketersediaan lahan							
	Ketersediaan lahan	Lahan terbangun	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Rawan bencana banjir	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Rawan bencana tanah longsor	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Sempadan sungai	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Sempadan mata air	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		Sempadan danau	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo

No	Jenis Analisis	Nama Data	Tipe Data	Unit Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Tahun Data	Sumber Data
		Kawasan hutan	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
		LSD	Peta	Kabupaten	Sekunder	Survei instansi	2024	DPUPR Kabupaten Wonosobo
6	Analisis area potensial							
	Area potensial	Jarak terhadap jalan utama	Peta	Kabupaten	Sekunder	Telaah dokumen	2025	Kementerian Perindustrian
		Jarak bangunan ke SPBU	Peta	Kabupaten	Sekunder	Telaah dokumen	2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jarak bangunan ke TPA	Peta	Kabupaten	Sekunder	Telaah dokumen	2025	SNI
		Jarak bangunan ke permukiman	Peta	Kabupaten	Sekunder	Telaah dokumen	2025	SNI
		Radius yang terlayani oleh jaringan listrik	Peta	Kabupaten	Sekunder	Telaah dokumen	2025	Kementerian Perindustrian
		Radius yang terlayani oleh jaringan air bersih	Peta	Kabupaten	Sekunder	Telaah dokumen	2025	Kementerian Perindustrian

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1.6.2 Instrumen Pengumpulan Data

Pada dasarnya, Instrumen pengumpulan data tidak terlepas dari metode pengumpulan data (Anufia & Alhamid, 2019). Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Teknik Telaah Dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui sejumlah dokumen informasi. Dokumen dapat diperoleh dari dokumen resmi dan dokumen lainnya yang dianggap relevan seperti:

- a) Studi kepustakaan seperti buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan dokumen lainnya untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan
- b) Data instansi yang dikumpulkan melalui permohonan data dengan beberapa dinas/instansi terkait.
- c) Dokumentasi melalui observasi tak langsung terkait keberadaan fasilitas pada Google Maps dan Google Earth.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penghimpunan data dengan melakukan tanya jawab yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ahli dalam pengembangan sarana penunjang pendukung kawasan agropolitan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive yang digunakan untuk menggali informasi mengenai penanganan pasca panen pada jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Wonosobo.

1.6.3 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dalam menyelesaikan tugas akhir. Tujuan dari teknik analisis deskriptif kuantitatif adalah untuk pengujian serta pengukuran data berdasarkan perhitungan matematik. Teknik analisis ini digunakan pada:

1. Analisis Potensi Ekonomi

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang berfungsi untuk mempermudah analisis tabel-tabel dan grafik secara sederhana sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan dari objek penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui komoditas unggulan, maka dapat menggunakan alat analisis berupa analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share.

- a. Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) merupakan analisis ekonomi untuk mengidentifikasi sektor basis yang dapat melayani kebutuhan ekonomi daerah itu sendiri maupun melakukan ekspor ke daerah lain untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Rumus yang digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor dari wilayah tersebut adalah:

$$LQ = \frac{Q_{ij}/Q_j}{Q_{ir}/Q_r}$$

Dimana:

LQ : Koefisien LQ

Q_{ij} : Jumlah produksi (ton) komoditas j di kecamatan k

Q_j : Total produksi (ton) komoditas di kecamatan k

Q_{ir} : Jumlah produksi (ton) komoditas j di Kabupaten

Q_r : Total produksi (ton) komoditas di Kabupaten

Nilai $LQ > 1$ berarti komoditas pada subsektor i di wilayah li terhadap total produksi komoditas wilayah Li lebih besar dibandingkan komoditas untuk sektor yang sama secara wilayah lebih luas dan dapat menyediakan lapangan kerja melebihi sektor i secara wilayah lebih luas. Nilai $LQ > 1$ berarti bahwa sektor tersebut basis (Laili & Diartho, 2018).

b. Shift Share

Metode shift share adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional) (Mira, 2016). Hasil analisis menunjukkan tentang bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu daerah/wilayah dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya, misalnya apakah tumbuh cepat atau lambat. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa perubahan produksi/kesempatan kerja dipengaruhi oleh 3 komponen pertumbuhan wilayah (Kusumaningdyah, 2022) yaitu:

1. Komponen pertumbuhan nasional (KPN) sering disebut sebagai national share;
2. Komponen pertumbuhan proporsional (KPP) sering disebut sebagai proportionality shift atau mixed shift; dan
3. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (KPPW) sering disebut sebagai (differential shift atau competitive shift).

Berikut adalah rumus pertumbuhan ekonomi yang digunakan:

$$\begin{aligned} PE &= KPN + KPP + KPPW \\ &= (Y_t/Y_{o-1}) + (Y_{it}/Y_{io} - Y_t/Y_o) + (y_{it}/y_{io} - Y_t/Y_o) \\ &= [Ra-1] + [Ri-Ra] + [ri-Ra] \end{aligned}$$

Keterangan:

PE = pertumbuhan ekonomi wilayah lokal

Y_t = indikator Produktivitas wil. Kabupaten, akhir tahun analisis.

Y_o = indikator Produktivitas wil. Kabupaten, awal tahun analisis.

Y_{it} = indikator Produktivitas wil. Kabupaten sektor i, akhir tahun analisis

Y_{io} = indikator Produktivitas wil. Kabupaten sektor i, awal tahun analisis

y_{it} = indikator Produktivitas wil. Kecamatan sektor i, akhir tahun analisis

y_{io} = indikator Produktivitas wil. Kecamatan sektor, awal tahun analisis

Pergeseran bersih dihitung dengan rumus:

$$PB = KPP + KPPW$$

Dengan ketentuan:

Jika $PB \geq 0 \rightarrow$ sektor tersebut progresif/maju

Jika $PB < 0 \rightarrow$ sektor tersebut lamban/mundur

2. Analisis Ketersediaan Fasilitas Pendukung Komoditas Unggulan

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pertanian sesuai fasilitas pendukung berupa pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran yang lebih memfokuskan pada setiap kecamatan produsen komoditas unggulan yang disesuaikan dengan parameter fasilitas pendukung pertanian. Analisis ini akan merumuskan kecamatan-kecamatan yang memiliki fasilitas pendukung pertanian terhadap komoditas unggulan. Jika terdapat ketidakadaan maka menjadi suatu kebutuhan.

3. Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendukung Pertanian

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang berfokus pada ketidakadaan yang ada di kecamatan produsen komoditas unggulan. Kemudian dilakukan perhitungan kebutuhan dengan pendekatan jumlah produksi setiap komoditas pada kecamatan produsen komoditas unggulan. Berikut merupakan beberapa rumus pendekatan perhitungan kapasitas minimum produktivitas untuk satu fasilitas pertanian, seperti:

- a. Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi 2002 bahwa kapasitas *Rice Milling Unit* yaitu 0,7 ton/unit, dengan asumsi pemakaian yaitu jam/hari x 25 hari/bulan x 8 bulan/tahun = 1.600 jam/tahun.
 - b. Teknologi penggilingan jagung biasanya bekerja dengan prinsip tumbukan (*Hammer Mill*) dengan kapasitas besar 1-1,5 ton/jam (Adriansyah et al., 2014).
 - c. Input minimal pada industri kopi skala kecil yaitu sebesar 750 kg (Sudarwanto, dkk, 2019)
 - d. Kapasitas penggilingan Tembakau adalah 80 kg/jam (Safitra, dkk, 2023)
 - e. Berbasis penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber daya, desa-desa di sentra pengembangan kelapa dapat membangun industri kelapa terpadu dengan kapasitas 1000-10.000 butir kelapa/hari (Wulandari & Alouw, 2021)
 - f. Di bidang industri perkebunan kakao, memiliki kapasitas olah 1 Ton/bulan (Marendera, 2023).
 - g. Kapasitas produksi usaha industri pengolahan karet adalah 437,5 kg/jam atau 3.500 kg/hari (Nasir & Aktiva, 2022).
 - h. Kapasitas produksi industri PT. Perkebunan Tambi adalah 180-200 kg per jam (Batubara, dkk, 2021).
 - i. Daya simpan komoditas pertanian yang dapat disimpan di cold storage (Sunaryanto et al., 2011).
 - j. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang menyatakan bahwa terdapat gudang tertutup dan terbuka. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin, sedangkan gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu. Pada penanganan pasca panen komoditas hasil pertanian, lebih baik disimpan pada gudang tertutup, agar mencegah serangan hama dan penyakit. Berikut merupakan klasifikasi gudang tertutup:
 - Gudang tertutup golongan A dengan kapasitas penyimpanan antara 360 m³ sampai dengan 3.600 m³
 - Gudang tertutup golongan B dengan kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ sampai dengan 9.000 m³
 - Gudang tertutup golongan C dengan kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³
4. Analisis Ketersediaan Lahan dan Analisis Area Potensial

Analisis ketersediaan lahan dan area potensial menggunakan pendekatan Teknik Boolean atau teknik tumpang tindih perkalian yang bertujuan untuk melakukan penyaringan data yang paling sesuai untuk lahan permukiman (Haidir, 2019). Analisis ketersediaan lahan dilakukan dengan pemetaan spasial (overlay) sehingga hasil analisis berupa area persebaran lahan potensial berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Teknik Boolean mengklasifikasikan data menjadi dua jenis yaitu :

0 = lahan tidak sesuai

1 = lahan sesuai

Hasil akhir atau luaran Tugas Akhir dirumuskan dari hasil analisis-analisis yang telah dilakukan. Output yang dihasilkan berupa pengembangan sarana penunjang pendukung kawasan agropolitan berupa pendukung pertanian, distribusi/penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran yang dapat mendorong pelayanan kegiatan pertanian. Pengembangan sarana penunjang pendukung kawasan agropolitan di Kabupaten Wonosobo ini nantinya akan diajukan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan salah satu syarat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.